



Article Informations

Received: 27/08/2024; Accepted:
07/02/2025; Published: 07/02/2025

Corresponding Email:

6211191107.juanmaichel@gmail.com

KERJASAMA INDONESIA, MALAYSIA DAN FILIPINA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN MARITIM DI LAUT SULU TAHUN 2016 – 2018

Juan Maichel Tumilaar¹⁾ Angga Nurdin Rachmat²⁾ Renaldo Benarrivo³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Laut Sulu selama periode 2016-2018. Kawasan Laut Sulu menjadi fokus utama karena tingginya ancaman keamanan maritim seperti perompakan, penyelundupan senjata, dan terorisme maritim oleh kelompok Abu Sayyaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori keamanan maritim dan kompleks keamanan regional (RSCT) untuk menganalisis bagaimana ketiga negara ini bekerja sama dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina berhasil mengurangi jumlah insiden kejahatan maritim di Laut Sulu, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, Peran Indonesia, Keamanan Regional

Abstract

This research discusses the cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines in maintaining maritime security stability in the Sulu Sea during the 2016-2018 period. The Sulu Sea region is the primary focus due to the high maritime security threats such as piracy, arms smuggling, and maritime terrorism by the Abu Sayyaf group. This study uses the maritime security theory and Regional Security Complex Theory (RSCT) approach to analyze how these three countries cooperate to address these threats. The findings show that the trilateral cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines has successfully reduced the number of maritime crime

incidents in the Sulu Sea, although challenges remain in coordination and law enforcement.

Keywords: *Maritime Security, Indonesia's Role, Regional Security*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, banyak sekali konsep-konsep mengalami perubahan, yang salah satunya adalah konsep keamanan. Beberapa perubahan ini dimulai dengan berakhirnya perang dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dampak berakhirnya perang dingin ini membuat konsep keamanan bagi setiap negara memiliki fokus yang sangat berbeda. Pada saat perang dingin ini belum berakhir, fokus awal dari setiap negara untuk mempertahankan sebuah keamanannya menuju kepada bidang kemiliteran, namun seraya perubahan terjadi fokus ini berubah bukan hanya pada bidang militer saja yang di tingkatkan tetapi kepada bidang non-militernya juga, seperti ekonomi, lingkungan, maupun sosial dan budaya.¹

Kata ‘keamanan’ itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta “ksham” yang mempunyai arti “tidak berbahaya” atau “tanpa ancaman”. Keamanan biasanya di ketahui secara konvensional dengan adanya bahaya berupa fisik (militer) dari luar. Ahli Hubungan Internasional Walter Lippmann mengatakan penjelasannya terkait keamanan yang sangat terkenal: “A nation is safe as long as it cannot be forced to sacrifice values it deems vital., and if it can avoid war or if forced to do so can emerge victorious.”² Kata Walter Lippman ini mengartikan jika sebuah negara akan aman jika negara itu tidak di paksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang di anggap penting, dan jika negara bisa menghindari dari perang ataupun jika terpaksa untuk berperang, negara harus bisa muncul sebagai pemenang.

Dengan begitu Arnord Wolfers seorang sarjana Hubungan Internasional, dan juga sebagai pelopor dari *classical international relations realism*, menyimpulkan bahwa masalah setiap negara dalam keamanan yaitu adalah dengan meningkatkan kekuatan untuk bisa mencegah sekaligus mempertahankan (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) dengan melakukan serangan.³

Keamanan Maritim sendiri yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam sebuah perlindungan dan keamanan dari kedaulatan sebuah negara. Dalam hal ini tercapainya kesejahteraan masyarakat dan juga hubungan baik antar wilayah, kestabilan kawasan, dan penguatan kapasitas

¹ RR Zahro Hayati Azizah, “Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda,” *Diplomasi Pertahanan*. Vol 06 No.3 (2020) 95. Diakses 22 Juni 2023

² Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) 121. Diakses 22 Juni 2023

³ Rodon Pedrason, *Buku Ajar Keamanan Nasional* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2021)

nasional tidak lain negara harus mempertahankan keamanan maritimnya.⁴ Terkait dengan masalah ini, Indonesia sendiri merupakan sebuah negara berkepulauan yang memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia merupakan lautan yang keamanan maritimnya harus di pertahankan.⁵ Konsep keamanan maritim itu sendiri merujuk pada PBB diantaranya menyangkut: Pembajakan atau perompakan, Terorisme maritim (*maritime terrorism*), Peredaran senjata ilegal, Perdagangan manusia, Imigran gelap, Pencurian ikan, dan Pencemaran lingkungan laut.⁶

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah di sebutkan pada sebelumnya memiliki permasalahan dalam keamanan yang berkaitan dengan jalur laut. Salah satunya adalah Laut Sulu, karena perairan ini mempunyai nilai yang sangat strategis dan trek pelayaran yang padat, dan itu dianggap sebagai tempat yang berbahaya setelah Selat Malaka. Karena pentingnya laut Sulu-Sulawesi, setidaknya ada setengah dari pelayaran komersil dan juga kapal-kapal besar melewati jalur ini, karena dilihat dari jalur Selat Malaka yang memiliki perairan yang dangkal untuk di lewati oleh kapal-kapal besar. Jumlah nilai perdagangan yang melawati rute perairan Laut Sulu memiliki nilai setiap tahunnya mencapai US\$ 800.000.000.⁷

Nilai strategis yang dimiliki Laut Sulu bisa dilihat dengan adanya ribuan armada dagang hingga armada tanker yang berisi minyak yang melewati jalur Laut Sulu, karena potensi, letak dan kualitas dari kegiatan laut berada pada perairan tersebut. Selain itu juga perairan ini letaknya pada puncak Segita Terumbu Karang Dunia, yang telah di iris menjadi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal inilah yang menjadikan tambahan nilai bagi perairan di Laut Sulu.⁸ Tetapi dengan adanya potensi yang menguntungkan dari Laut Sulu ini, juga menghasilkan potensi-potensi yang buruk pada ketiga negara yang berbatasan langsung di perairan ini, seperti yang singgung diawal penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan senjata, pelanggaran wilayah, perdagangan manusia, hingga perampokan/pembajakan kapal dan peculikan (*Maritime Piracy*).⁹

Maritime Piracy atau perompakan yang terjadi di Laut Sulu menjadi ancaman serius yang mengganggu kehidupan manusia, dan juga kepentingan nasional negara. Kelompok radikal yang biasanya melakukan

⁴ Suharyo, "Enforcement of Maritime Security in the Unitary States of the Republic of Indonesia and Problems Thereof," *Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No.3 (2019) 286. Diakses 23 Juni 2023

⁵ Marsetio, *Sea Power Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas Pertahanan, 2014) 91. Diakses 23 Juni 2023

⁶ Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015) 177-195. Diakses 23 Juni 2023

⁷ Reginald Ramos, "Philippines: Shifting Tide in the Sulu-Celebes Sea", *Perth USAsio Centre*, Vol.4 (April 2017) 2. Diakses 23 Juni 2023

⁸ Ismah Rustam, "Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi", *Jurnal Penelitian Politik* Vol 14 No.2 (2017) 14. Diakses 28 Oktober 2023

⁹ Ian Storey, "Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress", *Asia Policy* No.6 (Juli 2008) 204. Diakses 28 Oktober 2023

aksi perompakan di Laut Sulu adalah kelompok Abu Sayyaf, kelompok ini sering sekali melakukan kegiatan terornya kepada warga Indonesia yang melintas. Laut Sulu dijadikan tempat berlintasnya kapal minyak atupun batu bara dari Indonesia ke Filipina, ini menjadikan kesempatan bagi kelompok Abu Sayyaf melakukan pembajakan dan penculikan di kawasan perairan Filipina. Terhitung selama tahun 2016 ada sebanyak 18 kali insiden yang terjadi di Laut Sulu.¹⁰

Tabel 1.1

Data Keamanan Maritim Laut Sulu

Incident Type	2016	2017	2018	Total
Actual	12	3	2	17
Attempted	6	4	1	11
Total	18	7	3	28

Sumber: ReCAAP's Annual Report 2018

Mengacu pada kesimpulan Arnord Wolfers setiap negara dalam keamanannya harus meningkatkan kekuatannya, yang dimana Indonesia memulai inisiasi untuk mengadakan pertemuan dengan mencari kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menyelesaikan masalah keamanan maritim yang terjadi di Laut Sulu. Hal ini di respon baik dari Malaysia dan Filipina untuk bekerjasama dan mengikuti pertemuan yang diadakan di Yogyakarta, Indonesia pada 5 Mei 2016.

Pertemuan yang diadakan ini bersepakat untuk mendeklarasikan bersama Menteri Luar Negeri dan Panglima Militer dari ketiga negara, tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama (*Joint Declaration On Immediate Measures To Address Security Issues In The Maritime Areas Of Common Concern Among Indonesia, Malaysia And The Philippines*). Pertemuan ini dihadiri oleh Mentri Luar Negeri Indonesia H.E Retno L.P Marsudi, Mentri Luar Negeri Malaysia H.E Dato Sri Hanifah Aman, Sekretaris Mentri Luar Negeri Filipina H.E Jose Rene D. Almenders, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto, Panglima Tentera Diraja Malaysia Jenderal Tan Dri Dato Sri (Dr) Zulkifli Bin Mohd. Zin, dan Flag Officer Tentera Filipina Vadm Caesar C. Taccad AFP.¹¹

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. Kualitatif bisa di definisikan sebagai sumber data dan informasi yang tidak menggunakan alat statistik dalam menyusun penelitiannya.¹² Menurut Dezin dan Lincoln pada penelitian kualitatif

¹⁰ Aisyah Jasmine Maulana, Thania Apri Wijaya, "Kerja Sama Multilateral Indonesia Sebagai Strategi Perlawanan Terhadap Maritime Piracy Di Laut Sulu" *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* Vol 4 No. 2 (2022) 37-38. Diakses 28 Oktober 2023

¹¹Nandang Hermawan, "Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina", Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat, (6 Mei 2016) internet, 23 Juni 2023, tniad.mil.id

¹² Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif" Kementerian Keuangan Republik Indonesia (6 Maret 2019) internet, 27 Oktober 2023, www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel

mencakup berbagai macam artikel dan penelitian empiris seperti studi kasus, pengalam personal seseorang, cerita kehidupan, intropektif, observasional, wawancara, sejarah teks-teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian yang rutin dan problematis yang sangat bermakna dalam kehidupan individu, dan juga interaksional.¹³

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yang dimana tipe ini bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Creswell mengatakan bahwa metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data-data deskriptif berupa perkataan, tulisan, serta perilaku yang bisa dilihat atau diamati.¹⁴ Dengan begitu dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan, menganalisis, menjabarkan, dan juga menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian Kerjasama Indonesia, Malaysia, Dan Filipina Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Di Laut Sulu Tahun 2016-2018, akan di bahas menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis melalui data-data yang sudah tersedia sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif alat penelitiannya yaitu adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai orang yang bisa menyajikan data dan menentukan suatu objek penelitiannya, menganalisis data tersebut dan menganalisisnya untuk menghasilkan jawaban dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini Creswell memberikan tahapan khusus dalam penelitian kualitatif yaitu diantaranya, pengumpulan data; yang dimana peneliti harus bisa memperhatikan dalam memilih sebuah objek/partisipan yang berpotensi dan bisa menentukannya, guna untuk menjangkau kemampuan partisipan secara aktif dalam penelitian.¹⁵

Penelitian yang dilakukan ini merupakan sebuah bentuk hasil dari mencari pemahaman terhadap fenomenal sosial atau fisik yang terjadi dan diperoleh melalui pencairan yang intensif dan terfokus. Penelitian dalam pengertiannya yang luas merupakan sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data, informasi dan fakta untuk pengembangan mengenai penelitian, dengan begitu terdapat beberapa cara dalam mendapatkan data-data dan juga informasi yang di butuhkan dan relevan dalam penelitian ini, yaitu:

Dalam mengumpulkan sebuah sumber data, peneliti menggunakan sumber data studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang di bahas

¹³ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (California: SAGE Publication, 1994) 1. Diakses 17 Oktober 2023

¹⁴ John. W Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach 3rd Edition* (Los Angels: Sage Publication, 2009) 1. Diakses 17 Oktober 2023

¹⁵ John. W Creswell, *Op.cit.*, 150.

pada penelitian ini. Sumber-sumber yang dimaksud, yaitu; seperti artikel, teori para ahli dan juga buku. Menurut pendaat Cresswell data sekunder yang sedang diteliti dalam metode penelitian kualitatif di peroleh secara tidak langsung dari tinjauan-tinjauan pustaka, yang sebelumnya di sebutkan seperti buku-buku, artikel terkait hubungan internasional, situs yang mendukung, juga karya ilmiah yang sebelumnya telah diteliti.¹⁶ Dengan demikian studi kepustakaan ini sangat mempermudah, dan membantu dalam penelitian untuk mengolah data-data yang ada.

Dalam menganalisis data, peneliti memerlukan teknik untuk menghasilkan sebuah jawaban dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif memiliki bentuk yang terstruktur dan tidak terstruktur, dengan begitu perlu untuk bisa merincikan dan menyatukannya dalam bentuk penulisan yang utuh. Menurut Cresswell, bahwa data-data yang telah terkumpul kemudian dapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratus, tidak menjadi tumpang tindih, dan efektif melalui tahapan-tahapan prosedur analisis data.¹⁷ Dengan begitu teknik analisis data sangat penting menyajikan penulisan yang baik dan efektif, berikut beberapa langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman:¹⁸

1. Pengumpulan data (*collecting data*) Mengumpulkan seluruh data yang relevan dan tepat untuk menentukan fokus dan pemahaman data penelitian.
2. Reduksi data (*data reduction*) Reduksi data dilakukan untuk mengarahkan dan memfokuskan data yang diperlukan hingga tidak diperlukan sehingga data yang dianalisis sudah terorganisir sesuai yang dibutuhkan.
3. Penyajian Data (*data display*) Penyajian data yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga hasil data yang ada dapat lebih mudah untuk dipahami.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) Kesimpulan akan didapatkan melalui kegiatan ini ketika data yang telah dianalisis sudah pada tahap penyelesaian.

PEMBAHASAN

Superior Capabilities

Dalam buku “*Handbook of Leadership*” karya Bernard M. Bass, dijelaskan bahwa sikap *superior* dapat muncul dalam kepemimpinan transformasional. Ini

¹⁶ John. W Cresswel, *Op.cit.*, 151.

¹⁷ John. W Cresswel, *Op.cit.*, 152.

¹⁸ Matthew B. Miles, A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode baru, Ter. Tjejep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992) 15.

berarti model kepemimpinan ini lebih menekankan pada rasa percaya dan hubungan timbal balik antara anggota. Sikap *superior* yang dimaksud adalah kemampuan seorang pemimpin yang terus berupaya mencapai tujuan kelompok meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadinya.¹⁹

Kapabilitas *superior* tersebut diukur dengan tiga tolok ukur: selalu mengingatkan pihak lain tentang tujuan kelompok, mendorong anggota untuk menyingkirkan kepentingan pribadi demi tujuan kelompok, serta berperan aktif dalam setiap kegiatan.²⁰ Contoh kapabilitas *superior* ini juga dapat dilihat pada tingkat negara. Pemerintah Indonesia menunjukkan kapabilitas *superior* dibandingkan dua negara lainnya dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Contohnya, Indonesia mendorong kesepakatan mekanisme *Hot Pursuit* meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut untuk kapal perang asing di wilayah Indonesia. Fokus Indonesia adalah mencapai tujuan kerjasama, yaitu meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap ancaman keamanan di Laut Sulawesi - Sulu.

Selain itu, jika dilihat dari kapabilitas material, Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih unggul dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut data dari *Global Firepower*, yang melakukan pemeringkatan kekuatan militer negara di dunia, Indonesia berada di posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dengan *power indeks* 0,5231. Peringkat ini didasarkan pada 50 indikator seperti anggaran militer, jumlah personil, peralatan militer, kondisi geografis, jumlah penduduk, hingga utang luar negeri. Keunggulan ini terlihat dalam kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulawesi - Sulu, terutama dalam program *Trilateral Air Patrol*, di mana Indonesia mengirimkan delapan *CASA/IPTN CN-235s*. Sedangkan Malaysia hanya mengirimkan dua *Beechcraft B200T Super King Airs* dan Filipina tidak mengirimkan pesawat tempur karena keterbatasan peralatan militer.²¹

Traditional National Role

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara baik dari segi wilayah geografis, jumlah penduduk, hingga pengaruh politik dan ekonominya terhadap negara lain. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam komitmennya, Indonesia memprioritaskan sinergitas antara PBB dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas

¹⁹ Bernard M. Bass, *Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications*, 3rd ed. (New York: Free Press, 1990), 45. Diakses 10 Agustus 2024

²⁰ Bernard M. Bass, *Leadership and Performance Beyond Expectations* (New York: Free Press, 1985), 20. Diakses 10 Agustus 2024

²¹ Apriyana, *Pembangunan Ekonomi di Asia Tenggara*. (Jakarta: Akademik, 2019) 141. Diakses 10 Agustus 2024

keamanan dunia dengan menjadi mediator dalam konflik dan menjaga perdamaian dunia.

Di lingkup Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai “*leading state actor*” karena peran intensifnya dalam agenda besar kawasan, seperti pendiri ASEAN. Indonesia juga berpartisipasi aktif dan terbukti berhasil menyelesaikan masalah sub-regional di ASEAN, misalnya konflik antara Vietnam dan Kamboja serta konflik Filipina dan MNLF.²²

Pada masa pemerintahan Jokowi, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali bangkit. Hal ini terlihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang menaruh perhatian pada isu maritim, seperti kepemimpinan dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*) pada tahun 2017 dan peran dalam memprakarsai terbentuknya AIS Forum (*Archipelagic and Island States Forum*). Kedua organisasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kebijakan luar negeri dengan empat agenda utama dalam isu maritim: pembangunan ekonomi berbasis maritim, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah plastik di laut, serta pengelolaan laut yang berkelanjutan dan bijak.²³

Wacana maritim ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno, namun sempat mereda beberapa tahun sebelum bangkit kembali di era Jokowi pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi pelopor pembentukan EAS (*East Asia Summit*) untuk mendorong kerjasama maritim regional, yang membuat pemerintah Indonesia berkomitmen mengarahkan kebijakan luar negeri pada isu kemaritiman termasuk menangani kejahatan maritim di Laut Sulawesi - Sulu melalui kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina.²⁴

Indonesia menginisiasi kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang mencapai kesepakatan dalam *Joint Declaration* tahun 2016. Indonesia juga berperan dalam mendorong pembentukan *Maritime Command Control* yang berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi antar negara untuk menghadapi ancaman kejahatan di perbatasan. Pusat ini diresmikan pada tahun 2017 di Tarakan, dengan perwakilan dari masing-masing negara hadir. Ini sesuai dengan fokus Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam meningkatkan kepemimpinan Indonesia terhadap penanganan masalah keamanan maritim baik di tingkat regional maupun global.

²² Nio, *Indonesia dan Diplomasi Maritim* (Jakarta: Penerbit Universitas, 2019), 188. Diakses 10 Agustus 2024

²³ Ahmad, "Peran Indonesia dalam ASEAN dan Kepemimpinan Regional," *Jurnal Internasional Asia Tenggara* 10, no. 2 (2020): 45-67. Diakses 11 Agustus 2024

²⁴ *Ibid.* Diakses 11 Agustus 2024

Informal Understandings

Peran kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara tetangganya, Malaysia dan Filipina, yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di lingkup regional, negara-negara ini memiliki wadah persatuan dalam ASEAN. Terbentuknya ASEAN merupakan wujud integrasi kawasan yang menjunjung norma “*ASEAN Way*”. Negara-negara Asia Tenggara memiliki pandangan yang sama mengenai prinsip non-intervensi, yang bertujuan untuk menjaga dan menghormati kedaulatan negara serta menjunjung tinggi perdamaian antar negara. Prinsip ini diimplementasikan dalam menghadapi permasalahan dengan mengedepankan kerjasama, contohnya kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani peningkatan kejahatan maritim di Laut Sulu pada tahun 2016.²⁵

Prinsip *non-intervensi* ini menjadi salah satu dasar keyakinan Indonesia dalam mendorong kesepakatan mekanisme *Hot Pursuit* yang memungkinkan kapal perang negara lain memasuki wilayahnya. Indonesia percaya bahwa Filipina dan Malaysia tidak akan melanggar prinsip non-intervensi tanpa alasan kuat dalam mekanisme *Hot Pursuit*. Kesepakatan dalam kerjasama trilateral semakin memperkuat pandangan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ketiga negara juga cenderung harmonis, terbukti dengan adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam upaya *counter-terrorism* melalui *Corpat Philindo*.²⁶

Dalam sengketa Sabah, pemerintah Filipina sudah tidak menuntut hak kedaulatannya atas wilayah tersebut. Dalam konflik tahun 2013 di Sabah, konfrontasi dilakukan oleh utusan Kesultanan Sulu yang masih mengklaim wilayah Sabah sebagai tanahnya. Pemerintah Filipina justru memulangkan warganya yang terlibat dalam aksi tersebut sehingga hubungan bilateral antara Filipina dan Malaysia tetap kondusif. Dalam persoalan tumpang tindih wilayah perairan, ketiga negara sepakat untuk mengutamakan perundingan dalam menentukan batas wilayah.²⁷

Dengan fakta-fakta tersebut, pemerintah Indonesia yakin mendorong mekanisme *Hot Pursuit* meskipun sejarah konflik di perairan pernah terjadi antara ketiga negara. Optimisme Indonesia terbukti, karena setelah mekanisme tersebut ditetapkan, belum ada kapal negara lain yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Negara-negara dalam kerjasama trilateral tetap

²⁵ Zulkarnain, *Integrasi dan Diplomasi di Asia Tenggara* (Jakarta: Penerbit Asia, 2021), 67-70. Diakses 12 Agustus 2024

²⁶ Alamsyah, "ASEAN Way dan Kerjasama Maritim di Laut Sulu," *Jurnal Hubungan Internasional* 20, no. 1 (2022): 45-62. Diakses 12 Agustus 2024

²⁷ *Ibid*, 45-62. Diakses 12 Agustus 2024

mengedepankan metode patroli yang terkoordinasi di wilayah perairan masing-masing untuk menjaga keamanan di Laut Sulawesi-Sulu.²⁸

Treaty Commitment

Indonesia, sebagai inisiator dalam membentuk kerjasama trilateral, harus mengedepankan tujuan yang telah disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis berupa “*Joint Declaration*”. Deklarasi Bersama ini mencakup agenda kebijakan untuk menangani permasalahan di kawasan Laut Sulawesi - Sulu pada tahun 2016.²⁹ Dalam kerjasama ini, komitmen terhadap perjanjian merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama.³⁰

Indonesia, bersama Malaysia dan Filipina, berupaya memperkuat keamanan di Laut Sulawesi - Sulu dari ancaman terorisme maritim, seperti penculikan di laut oleh Kelompok Abu Sayyaf.³¹ Meskipun kerjasama ini bersifat sub-regional, implementasi kebijakannya juga mengacu pada tujuan yang telah disepakati negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, di mana setiap negara anggota berkewajiban menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di kawasan ini.³²

Peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral ini menunjukkan posisinya sebagai “*Regional Leader*” yang turut bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan di kawasan.³³ Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat keamanan di Laut Sulawesi - Sulu, sejalan dengan komitmen ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan regional.³⁴

KESIMPULAN

Bab ini menguraikan peran strategis dan kapabilitas Indonesia dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang berfokus pada peningkatan keamanan maritim di wilayah Laut Sulawesi-Sulu. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia, dengan kapabilitas superiornya, baik dari segi militer maupun diplomasi, mampu memainkan peran utama dalam inisiatif ini. Kapabilitas superior ini tidak hanya tampak dalam kekuatan militer yang lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tetapi juga dalam kemampuan Indonesia untuk memimpin dan

²⁸ Zulkarnain, *Asean Way*, *Op.cit*, 67-70. Diakses 12 Agustus 2024

²⁹ "Joint Declaration of the Trilateral Cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines," 2016.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Anon, "Counter-terrorism and Maritime Security: The Role of Indonesia, Malaysia, and the Philippines," *Journal of Regional Security Studies* 8, no. 1 (2017) 45.

³² ASEAN Secretariat, *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009).

³³ Liana N. Lee, *Indonesia's Role as a Regional Leader in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020), 122.

³⁴ ASEAN Secretariat, *ASEAN Community Vision 2025* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015).

mendorong tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting, seperti mekanisme Hot Pursuit.

Indonesia memanfaatkan peran tradisionalnya sebagai leading state actor di Asia Tenggara, yang sudah lama dikenal berkat pengaruh politik, ekonomi, dan militernya di kawasan tersebut. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas regional. Ini tercermin dalam komitmennya untuk menjaga perdamaian, menyelesaikan konflik, dan memperkuat kerja sama regional. Di bawah pemerintahan Jokowi, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali dihidupkan, dengan kebijakan luar negeri yang menitikberatkan pada isu-isu maritim, termasuk upaya untuk menangani kejahatan maritim di Laut Sulawesi-Sulu melalui kerjasama trilateral ini.

Lebih lanjut, informal understandings yang diadopsi oleh Indonesia dalam kerjasama ini menunjukkan pendekatan diplomasi yang fleksibel namun efektif, yang mengedepankan kepercayaan dan pengertian bersama antara negara-negara yang terlibat. Ini adalah wujud dari norma “ASEAN Way” yang menekankan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Kesepakatan mekanisme Hot Pursuit, meskipun sensitif, berhasil diimplementasikan tanpa menimbulkan konflik, menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Di sisi lain, komitmen Indonesia terhadap perjanjian tertulis seperti Joint Declaration tahun 2016 menggarisbawahi pentingnya treaty commitment dalam kerjasama trilateral ini. Indonesia, sebagai inisiator, telah menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Laut Sulawesi-Sulu, sejalan dengan komitmen ASEAN untuk memelihara stabilitas regional. Peran ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan.

Secara keseluruhan, keberhasilan Indonesia dalam menginisiasi dan mengelola kerjasama trilateral ini mencerminkan kemampuannya dalam mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dengan kapabilitas yang dimiliki, baik dalam aspek militer, diplomasi, maupun komitmen terhadap perjanjian, Indonesia mampu menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan yang strategis ini. Kerjasama trilateral ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antar negara tetangga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abuza, Z. (2005). *Balik Terrorism: The Return of The Abu Sayyaf*. Carsile: Strategic Studies Institute.
- B, A. L. (2009). *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu.
- Banlaoi, R. C. (2008). *Al Harakatul Al Islamiyah, Essay on the Abu Sayyaf Group*. Quenzon: Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR).
- Barreveld, D. J. (2001). *Terrorism in the Philippines: The Bloody Trail of Abu Sayyaf, Bin Laden's East Asian Connection*. San Jose: Writer's Club.
- Barry Buzan, O. W. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Pass.
- Bass, B. M. (1990). *Theory, Research, and Managerial Applications, 3rd ed.* New York: Free Pass.
- Betsill, M. M., & et.al. (2006). *Palgrave Advances in International Environmental Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Bradford, J. (2005). *Southeast Asian Maritime Security in Age of Terror: Threats, Opportunity, and Charting the Course Forward*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Buzan, B. (1990). *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*. London: Pinter.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach 3rd Edition*. Los Angels: Sage Publication.
- David A Lake, P. M. (1997). *Regional Organs: Building Security in a New World*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Holsti, K. J. (1992). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Juanda, K. H. (1992). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Keohane, R. O. (1989). *Neoliberal Institutionalism: a Perspective on World Politic, in International Instituion and State Power*. Boulder: Westview Press.
- Lakshmanan, I. (2008). *Rich and Poor Fall Prey to Pirates dalam Andres H. Caceres Solari, Indonesia, Malaysia, and the Philippines Security Cooperation in the Celebes Sea, Department of National Security Affairs*. California: Naval Postgraduate School.
- Lee, L. N. (2020). *Indonesia's Role as a Regional Leader in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

- Martin, L. L. (2006). *Noeliberalism in Internasional Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Matthew B. Miles, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode baru, Ter. Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miani, L. (2011). *The Sulu Arms Market: National Responses to a Regional Problem*. Singapura: Institute of Asian Studies.
- Nio. (2019). *Indonesia dan Diplomasi Maritim*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Norman K. Denzin, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publication.
- O'Neil, K. (2009). *The Environment and International* . Cambridge: Cambridge University Press.
- Othman, Z. e. (2013). Non-Traditional Security Issues and the Stabilitu of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah vol. 4 No. 2*, 160.
- Pedrason, R. (2021). *Buku Ajar Keamanan Nasional*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Peter Chalk, e. (2009). *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Prawita, A. A. (2005). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachmat, A. N. (2015). *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta.
- Robert Jackson, G. S. (2013). *Introduction to International Realations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional Dalam Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* . Depok: Rajawali Press.
- Saadia M. Pekkanen, J. R. (2014). *Oxford Handbok of The Hubungan Interasional of Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Susanto, D. M. (2015). *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Till, G. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-first Century*. London: Frank Cass Publishers.
- Weatherbee, D. E. (2009). *International Relation in Southeast Asia The Struggle for Autonomy Second Edition*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Zulkarnain. (2021). *Integrasi dan Diplomasi di Asia Tenggara* . Jakarta: Penerbit Asia.

JURNAL:

- Adam J. Yung, M. J. (2003). Conflation of Piracy and Terrorism in Southeast Asia: Rectitude and Utility. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 2, 272.
- Ahmad. (2020). Peran Indonesia dalam ASEAN dan Kepemimpinan Regional. *Jurnal Internasional Asia Tenggara* 10, no. 2, 45-67.
- Aisyah Jasmine Maulana, T. A. (2022). Kerja Sama Multilateral Indonesia Sebagai Strategi Perlawanan Terhadap Maritime Piracy Di Laut Sulu. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*. Vol 4 No. 2, 37-38.
- Alamsyah. (2022). ASEAN Way dan Kerjasama Maritim di Laut Sulu. *Jurnal Hubungan Internasional* 20, no. 1, 45-62.
- Anon. (2017). Counter-terrorism and Maritime Security: The Role of Indonesia, Malaysia, and the Philippines. *Journal of Regional Security Studies* 8, no. 1, 45.
- Atkinson, G. (2012). Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman - A Review of the Rise of Islamic Insurgency in the Southern Philippines. *American Security Project*, 4.
- Azizah, R. Z. (2020). Redefining the Concept of Security in the Nation-State Policy Agenda. *Diplomasi Pertahanan* Vol.6 No.3, 95.
- Banlaoi, R. C. (2005). Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat. *Naval War College Review* Vol. 58 No, 4, 66.
- Banlaoi, R. C. (2006). The Abu Sayyaf Group: From Mere Banditry to Genuine Terrorism. *Southeast Asian Affairs*, 248.
- Dahalan, N. A. (2012). Maritime Violence: Implication to Malaysia. *Arena Hukum* Vol. 6 No. 1, 49.
- Eklöf Amirell, S. (2005). The Return of Piracy: Decolonization and International Relations in a Maritime Border Region (The Sulu Sea) 1959-1963. *Working papers in Contemporary Asian Studies*, No. 15, 3.
- Emmers, R. (2003). The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy. *UNISCI Discussion Papers*.
- Fellman, Z. (2011). Abu Sayyaf Group. *AQA M Futures Project: Case Studies Series* No. 3, 3.
- Holsti, K. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, Vol 14, No 3, 244.
- Jason Abbot, N. R. (1999). Pirates? Maritime Piracy and Societal Security in Southeast Asia. *Pacifica Review*, Vol. 11 No. 1, 9-11.
- John McFarlane, K. M. (1996). *Transnational Crime: The New Security Paradigm*, Working Paper No. 294. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Australian.
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 114-115.
- Kramer, K. (2001). Legal to Illegal: Southeast Asia's Illegal Arms Trade. *Kasarinlan Philippine Journal of Third World Studies* Vol. 16 No. 2, 45.

- LaVerle Berry, e. a. (2002). A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Extrimist Group. *The Library of Congress*, 105.
- Leymarie, P. e. (2014). UNOSAT Global Report on Maritime Piracy a geospatial analysis 1995-2013. *United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)*, 31.
- Liss, C. (2013). The Unique Challenges and Difficulties of Maritime Security Research. *SAIS Review Vol. XXXIII no. 2*, 94-95.
- Liss, C. (2014). Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends, Hotspots, and Responses. *PRIF Report No. 125*, 3.
- Miani, L. (2015, Juni 7). The Sulu Arms Market: Globalized Gunrunning Since 1521. *The Affiliate*.
- Muhammad Harry Riana Nugraha, A. S. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 177-178.
- Muhammad Harry Riana Nugraha, A. S. (2016). Muhammad Harry Riana Nugraha Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik Vol 1 No. 2* , 172-179.
- Othman, Z. e. (2013). Non-Traditional Security Issues and the Stabilitu of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah vol. 4 No. 2*, 160.
- Perwita, A. A. (2008). Koordinasi dan Kerangka Pengelolaan Keamanan di Selat Malaka secara Terpadu dalam Paliah, Steven Yohannes, Pengelolaan Isu-Isu Keamanan di Selat Malaka Periode 2005-2006. *Hubungan Internasional, FISIP UI*, 28.
- Pujayanti, A. (2016). Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf . *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VIII, No. 07/I/P3DI*, April.
- Putri, A. N. (2016). Kerjasama Indonesia, Malaysia Dan Singapura Di Selat Malaka Dalam Menangani Perampokan Bersenjata Tahun 2004-2013. *Journal of International Relations Vol 2 No.3*, 250-257.
- Rachmanto, A. S. (2009). Pola Penyeludupan dan Peredaran Senjata Api Illegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V no.II*, 32.
- Ramos, R. (2017). Philippines: Shifting Tide in the Sulu-Celebes Sea. *Perth USAsio Centre Vol.4*, 2.
- Raymond, C. Z. (2005). Piracy in Southeast Asia New Trends, Issues and Responses. *RSIS Working Paper No. 089*, 3.
- Richardson, M. (2004). The Threats of Piracy and Maritime Terrorism in Southeast Asia. *Maritime Studies issue 139*, 21.
- Simon, H. (2005). Terrorism Hurts World Trade. *Transatlantic Internationale Politik*, 59.
- Storey, I. (2008). Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress. *Asia Policy No.6*, 204.

- Suharyo. (2019). Enforcement of Maritime Security in the Unitary States of the Republic of Indonesia and Problems Thereof. *Penelitian Hukum De Jure Vol.19 No.3*, 286.
- Ulph, S. (2003). Evidence of Jemaah Islamiyah Expansion in the Philippines. *Terrorism Focus, vol. 2. No. 5*, 1.
- Wibisono, A. N. (2016). Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. *Ilmu Ushuluddin Vol. 3 Nomor 1*, 120.

INTERNET:

- 101, P. (t.thn.). United Nations Convention on the Law of the Sea. *United Nations*.
- Agency, C. I. (t.thn.). The world factbook . *CIA*.
- Ager, M. (2016, September). Gov't seizes 200 high-powered speedboats from Abu Sayyaf. *INQUIRER.Net 21* .
- Anonim. (2012). Small Arms and Light Weapons: A training manual. *Saferworlds*.
- Anonim. (2016, Mei). The Economics of Piracy in Southeast Asia. *The Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, hal. 5.
- Anonim. (t.thn.). Lexicon of alcohol and drug. *World Health Organization*.
- Askins, S. (2017, Februari 21). Piracy in the Sulu Sea -The new Somalia or a limited threat. *Tatham Macinnes*.
- Ayob, N. M. (2014). Issues of Safety and Security: New Challenging to Malaysia Tourism Industry. *SHS Web of Conferences 12 – EDP Sciences*.
- Bateman, S. (2010). Confrinting Maritime Crime in Southeast Asian Waters: Reexamining 'piracy' in twenty-first century dalam B.A. Elleman, ed., *Piracy and Maritime Crime: Historical and Modern Case Studies*. 417.
- BBC. (2017, Februari 12). Tujuh WNI diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf. *BBC Indonesia*.
- BBC. (t.thn.). Tujuh WNI diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf . *BBC Indonesia*.
- Chew, M. F. (t.thn.). iracy maritime terrorism and regional interests. *Australia Defence*.
- Defence, D. o. (2016, Juni 26). Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philippines, Malaysia and Indonesia. *Republic of The Philippines*.
- Febrianto, H. (t.thn.). Moratorium Batu Bara ke Filipina Buat Industri Pelayaran RI Lesu. *SINDONEWS*.
- Graman, L. (2015, Juli 9). Piracy increases by 22% in Southeast Asia. *CNBC*.
- Gumilang, P. (t.thn.). Menhan Tegaskan Moratorium Batu Bara ke Filipina Dilanjutkan. *CNN Indonesia*.

- Hermawan, N. (2016, Mei 6). Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. *TNI AD*.
- ICC-IMB. (2014). Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. *ICC-IMB*.
- ICC-IMB. (2015). Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. *ICC-IMB*.
- ICC-IMB. (2016, Januari-Juni 1). Piracy and Armed Robbery Against Ships Report. *ICC-IMB*, hal. 8.
- IMO. (2015). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). *International Maritime Organization*.
- Jocson, L. (2017). Hijacked Vietnamese vessel crew identified. *CNN PHILIPPINES*.
- Joint Declaration of the Trilateral Cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines. (2016).
- JP. (2008, Januari 23). RI Agrees to Install 7 Radars from U.S. in Makassar Strait. *Jakarta Post*.
- Masilamany, J. (2017). Four Malaysian sailors held hostages by Abu Sayyaf are freed. *ASIA NEWS*.
- Nations, E. o. (t.thn.). Philippines Economy. *NE*.
- Owners, G. f. (2017, April 27). Operators and Masters for Protection against Piracy in the Gulf of Guinea Region. *IMO*.
- Penulis, T. (t.thn.). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, Pasal 1 poin (a)*.
- Pujayanti, A. (2015). Budaya Maritim, Geo-Politik, dan Tantangan Keamanan Indonesia . *DPR*.
- Rachman, T. (t.thn.). Kapten Kapal Menyerah Setelah ABK Tertembak Pembajak. *REPUBLIKA*.
- Raj, R. (t.thn.). Dip in Sabah tourist arrivals since Lahad Datu intrusion. *Malaymail Online*.
- ReCAAP. (2015). Annual Report. *ReCAAP*.
- ReCAAP. (2016). Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia. *ReCAAP*, hal. 21.
- ReCAAP. (t.thn.). Special Report on Abducting of Crew from Ships in Waters off Eastern Sabah and Southern Philippines (Part II). *ReCAAP*.
- Sahana, M. (2016, Mei 5). Pertemuan Trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia Hasilkan 4 Kesepakatan. *VOA*.
- Secretariat, A. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Secretariat, A. (2015). *ASEAN Community Vision 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- TIME. (t.thn.). Kapten Kapal Menyerah Setelah ABK Tertembak Pembajak. *TIME*.
- UNDOC. (2015). World Drug Report. *United Nation Office on Drugs and Crime*.

- UNDOC. (t.thn.). Drug Trafficking Trends & Border Management in Southeast Asia: Responding to an evolving context of regional integration. *United Nation Office on Drugs and Crime*.
- UNODA. (2008). Small Arms and Light Weapons. *United Nations Office of Disarmament Affairs*.
- Wibisono, A. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.